

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data hasil penelitian yang telah dilakukan kepada masyarakat yang terlibat dan dianggap mempunyai kontribusi baik langsung maupun tidak langsung serta berpartisipasi dalam program PPAUD di kecamatan Merbau Mataram kabupaten Lampung Selatan sebagai dampak *Participatory Rural Appraisal (PRA)* terhadap partisipasi masyarakat, Peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Gambaran Penerapan PRA Dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan

Berikut ini beberapa alur atau tahapan pelaksanaan fasilitasi yang ditempuh dengan menerapkan metode PRA dalam penyelenggaraan program PPAUD di kecamatan Merbau Mataram kabupaten Lampung Selatan.

- a. Proses pemetaan masalah dan potensi.
- b. Musyawarah desa pembahasan hasil pemetaan masalah dan potensi.
- c. Identifikasi dan penetapan tempat kegiatan program PPAUD.
- d. Identifikasi dan pemilihan tim pengelola kegiatan, calon pendidik, dan tenaga PPAUD.
- e. Identifikasi dan perencanaan kegiatan.

f. Musyawarah desa pembahasan draft rencana kegiatan masyarakat.

Adapun teknik-teknik PRA yang digunakan dalam fasilitasi antara lain:

- a. teknik pembuatan peta sosial,
- b. teknik penelusuran lokasi/ desa (Transek), dan
- c. teknik pembuatan bagan hubungan kelembagaan (*diagram Vendan*).

2. Keunggulan dan Kelemahan Penerapan PRA Dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan

1) Keunggulan Penerapan PRA

Berikut ini adalah beberapa keunggulan dari penerapan metode PRA.

a) Melibatkan seluruh kelompok masyarakat.

Dalam penerapannya, PRA melibatkan semua lapisan masyarakat. Begitu juga dengan program PPAUD, hal yang utama dalam perencanaan dan pelaksanaannya adalah melibatkan semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, semua program yang dijalankan merupakan hasil penelusuran kebutuhan masyarakat penerima program.

b) Keikutsertaan masyarakat miskin

Masyarakat dari semua kalangan dilibatkan dalam program ini termasuk masyarakat miskin yang merupakan sasaran utama program PPAUD. Keterlibatan masyarakat tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Masyarakat miskin berkesempatan untuk melibatkan diri di dalamnya sehingga sasaran program akan lebih terarah sesuai tujuan yang diharapkan.

- c) Rasa tanggung jawab masyarakat akan keberlangsungan program lebih besar.

Masyarakat yang menjadi pengurus program PPAUD adalah warga desa setempat yang dipilih oleh warga desa tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat merasa memiliki program karena masyarakat ikut merancang dan melaksanakan program PPAUD.

- d) Melibatkan gender pada program

Prinsip yang mendasar dari sebuah program yang mengedepankan gender adalah bahwa yang memperoleh manfaat dari program tersebut haruslah mempunyai tanggung jawab atas prioritas-prioritas dalam pengambilan keputusannya. Begitupun pada program PPAUD, gender diperhatikan. Artinya, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan dan bekerjasama dalam menentukan apa yang ingin mereka capai. Di sebagian daerah, laki-laki biasanya memegang peranan paling banyak dalam pengambilan keputusan, tetapi pada program ini laki-laki dan perempuan duduk bersama dan berkesempatan untuk sama-sama merancang program.

- e) Cocok diterapkan di mana saja.

Pendekatan PRA bisa digunakan pada program di daerah mana pun baik dipegunungan, pesisir pantai, pedesaan, maupun perkotaan selama program tersebut menuntut adanya peran serta/keterlibatan masyarakat di dalamnya. Begitu juga di wilayah kecamatan Merbau Mataram kabupaten Lampung Selatan yang notabene masyarakatnya tinggal di daerah pedesaan dan pantai.

2) Kelemahan penerapan PRA

Selain keunggulan, metode PRA ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut.

- 1) Tidak semua fasilitator program memiliki kemampuan yang baik dalam memfasilitasi masyarakat. Hal ini tentu saja akan mengganggu proses penerapan PRA. Komunikasi yang kurang baik dari fasilitator akan menghambat partisipasi masyarakat yang semestinya menjadi hal pokok dalam suatu program pemberdayaan.
- 2) Pendekatan PRA identik dengan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan musyawarah-musyawarah yang sifatnya umum. Masyarakat dengan latar belakang berbeda tentunya memiliki karakter yang berbeda pula. Sebagian masyarakat takut atau malu untuk berbicara dalam pertemuan kelompok sehingga aspirasi dan keinginan-keinginan yang dimiliki tidak dapat tersampaikan dalam kegiatan fasilitasi/musyawarah.
- 3) Sebagian fasilitator belum terampil dalam memfasilitasi pengolahan dan analisis informasi. Hal ini merupakan kesatuan utuh yang menggambarkan kondisi desa/kampung serta masih adanya fasilitator yang belum terampil dalam memfasilitasi masyarakat supaya turut menentukan informasi kajian selanjutnya yang penting untuk didiskusikan.
- 4) Pada program PPPAUD, sebagian besar fasilitator adalah orang di luar lingkungan masyarakat setempat. Hal ini setidaknya akan menimbulkan kendala

selama proses fasilitasi. Kepercayaan masyarakat akan sedikit sulit menerima pihak luar dibanding dengan pihak dalam.

3. Dampak penerapan metode *Participatory Rural Appraisal* PRA terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hasil skor jawaban responden untuk variabel *Participatory Rural Appraisal* menunjukkan sebesar 82,18% dan hasilnya terletak pada daerah kontinum yang sangat tinggi. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa 82,18% responden mempunyai partisipasi yang tinggi terhadap *Participatory Rural Appraisal* sedangkan 18,18% responden belum berpartisipasi sesuai harapan sehingga perlu ditingkatkan lagi.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *Participatory Rural Appraisal* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat, yaitu sebesar 0,73 atau sebesar 73,01%, artinya jika *Participatory Rural Appraisal* tinggi, partisipasi masyarakat pun akan tinggi dan sebaliknya jika *Participatory Rural Appraisal* rendah, partisipasi masyarakat pun akan rendah.

Selain itu, hasil skor jawaban responden untuk variabel partisipasi masyarakat sebesar 83,50% dan hasilnya terletak pada daerah kontinum yang sangat tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa 83,50% responden mempunyai partisipasi yang tinggi

dan sekitar 16,50% responden mempunyai partisipasi masih belum optimal. Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi.

Dampak *Participatory Rural Appraisal* terhadap partisipasi masyarakat, berdasarkan uji regresi diperoleh persamaan regresi, yaitu $\hat{Y} = 7,74 + 0,97X$. Persamaan ini memperlihatkan bahwa setiap kenaikan satu unit pada *Participatory Rural Appraisal*, akan terjadi peningkatan terhadap partisipasi masyarakat sebesar 0,97. Koefisien determinasi yang menunjukkan berapa besar sumbangan atau kontribusi variabel *Participatory Rural Appraisal* terhadap variabel partisipasi masyarakat diperoleh sebesar 73,03%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat sebesar 26,99% yang dalam hal ini tidak diteliti oleh penulis. Setelah dilakukan uji signifikansi, ternyata diperoleh F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau $7,74 > 1,62$. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan Peneliti dapat diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang diperoleh, ada beberapa saran yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Merbau Mataram kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut.

1. Upaya perbaikan dan peningkatan partisipasi masyarakat harus terus dilakukan.

Terlebih lagi, pada indikator evaluasi. Lemahnya evaluasi harus dapat diperbaiki

dan diatasi dengan cara mengoptimalisasikan berbagai penyebabnya seperti lemahnya kontrol dari pihak-pihak terkait, koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, belum adanya kebijakan yang mengatur secara sistematis dalam bentuk rencana strategis pemerintah daerah terkait dengan program PAUD sehingga diharapkan dapat berpengaruh terhadap tingkat pencapaian program.

2. Pihak pemerintah daerah harus segera membuat kebijakan yang mengatur mengenai penyelenggaraan PAUD.
3. Optimalisasi dan aksesibilitas program PAUD pada setiap lapisan masyarakat khususnya kalangan masyarakat kurang mampu.
4. Perlu adanya diklat tentang manajemen pengelolaan dan pengembangan untuk para praktisi pada lembaga profesi PAUD.
5. Perlu menjalin kemitran yang lebih banyak dengan lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap pengembangan untuk pendidikan anak usia dini.
6. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan kuat dengan dinamisasi kehidupan masyarakat, di antaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, para praktisi pendidikan, seni dan budaya.